



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RUSLAN ABDUL GANI
2. Jabatan : KEPALA PELAKSANA
3. NHK : 93855

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 17.458.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m²/180 m² di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m²/21 m² di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 500 m² di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah Seluas 6291 m² di KAB / KOTA LOMBOK TIMUR, WARISAN Rp. 806.000.000
5. Tanah Seluas 12640 m² di KAB / KOTA LOMBOK TIMUR, WARISAN Rp. 6.320.000.000
6. Tanah Seluas 5250 m² di KAB / KOTA LOMBOK TIMUR, WARISAN Rp. 682.500.000
7. Tanah Seluas 528 m² di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 5128 m²/196875 m² di KAB / KOTA LOMBOK TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 100.000.000

1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 103.150.071



F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	17.661.650.071
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	17.661.650.071

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpн.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpн.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila di kemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.